

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Saifuddin Arif telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001


R.A. Vidya Gati, SE. M.El
NIP. 197605102007012030

Penguji I

Penguji II

Pembimbing

Dr. H. Sahid HM., M.Ag
NIP. 196803091996031002


Sukanto, SH., M.SI
NIP. 196003121999031001


Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005021982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syaifuddin Arif

Nim : C02304016

Semester : XIV

Jurusan : Siyasah Jinayah

Fakultas : Syariah

Alamat : Komplek KUA Krian No. 47 Krian Sidoarjo

Judul : “Studi Kritis tentang Penggunaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR Jo. UU Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Pandangan Fiqh Siyasah “

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2011
Saya yang menyatakan,



Muhammad Syaifuddin Arif
NIM: C02304016

ABSTRAK

Skripsi dengan judul: ” Penggunaan Hak Angket DPR Menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 Tentang Penetapan Hak Angket DPR Jo UU Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD dalam Pandangan Fiqih Siyasah”, bertujuan untuk menjawab pertanyaan, Bagaimanakah mekanisme dari pelaksanaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 Jo UU Nomor 22 Tahun 2003? Dan Bagaimanakah pandangan Fiqih Siyasah terkait dengan Hak Angket DPR?

Berkenaan dengan itu, maka penelitian ini menggunakan metode analisis data secara diskriptif, verifikatif dengan menggunakan pola pikir deduktif yang operasionalnya dimulai dari pemaparan tentang konsep lembaga perwakilan dalam fiqh siyasah yang disebut dengan *ahl ḥall wa al-‘aqd* (*Syura*), kewenangan *ahl ḥall wa al-‘aqd* (*Syura*) beserta landasan fiqh siyasah tentang pengawasan terhadap pemerintah, kemudian dipaparkan tentang Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Amandemen UUD 1945 dan sesudah Amandemen UUD 1945, Hak Angket DPR dan mekanisme dari pelaksanaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 Jo UU Nomor 22 Tahun 2003. Setelah itu dilakukan analisis tentang wewenang DPR sebagai pelaksana Hak Angket dan penerapan mekanisme Hak Angket DPR dalam pandangan Fiqh Siyasah.

Ahl al-hall wa al-'aqd dalam al-Qur'an disebutkan dengan lafal *al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.

Pelaksanaan hak angket DPR yang termuat dalam UU No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dan Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan teguran kepada pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi wakilnya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk *amr ma'ruf nahi munkar*. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket DPR yang termuat dalam UU No. 6 tahun 1954 dan Undang-Undang No. 22 tahun 2003 merupakan cara yang dilakukan DPR dalam memberikan teguran kepada pemerintah dengan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya dilakukan musyawarah untuk memutuskan hasilnya. Hal ini sesuai surat asy-Syura ayat 38 yang menganjurkan untuk bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Kajian pustaka.....	13
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metodologi Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LEMBAGA LEGISLATIF DALAM FIQH SIYASAH	
A. <i>Ahlu Halli Wal Aqdi</i>	22
B. Proses pemilihan keanggotaan <i>Ahlu Halli Wal Aqdi</i>	27
C. Wewenang <i>Ahlu Halli Wal Aqdi</i>	28
D. Landasan Fiqh Siyasah Tentang Pengawasan Terhadap Pemerintah	31

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

PENDAHULUAN

Negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kerja sama itu timbul karena setiap orang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹

Istilah *staat* mula-mula dipergunakan di Eropa Barat pada abad ke-15, bahwa kata *staat*, *state*, *etat* itu dialihkan dari kata *status* atau *statum* (bahasa

² Sunarso, dkk, *Panduan Pembelajaran Kewarganegaraan*, (Surakarta: Mediatama, 2004), 5.

Latin) yang secara etimologis berarti sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap.³

Beberapa ahli mengartikan kata *status* ini secara beragam, seperti misalnya Cicero mengartikan *standing* atau *station* (kedudukan) yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia⁴. Kranenburg yang menyatakan bahwa *lo stato* (dari bahasa Italia) yang dialihkan dari kata *status* memiliki arti pertama-tama keseluruhan jabatan tetap, kemudian diartikan sebagai pejabat-pejabat dari jabatan itu sendiri, penguasa beserta pengikutnya, dan akhirnya diartikan secara luas sebagai kesatuan wilayah yang dikuasai.⁵

Jean Bodin menggunakan kata *republique* dan *civitas* untuk kata status, sedangkan Thomas Hobbes menggunakan kata *commonwealth*. Hingga saat ini kata *status* dipergunakan untuk menunjukkan organisasi politik teritorial dari bangsa, dan kata negara ditafsirkan dalam berbagai arti seperti pemerintah, bangsa, dan masyarakat.⁶

Dalam perkembangannya pengertian negara dibedakan menjadi negara dalam arti formal dan negara dalam arti materiil. Negara dalam arti formal adalah negara sebagai pemerintah, negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat dan negara mempunyai wewenang untuk menjalankan

³ *ibid.*

⁴ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Putra Bardin, 1999), 90

⁵ Ibid., 91

⁶ Sunarso, dkk, *Panduan Pembelajaran*, 5.

paksaan secara legal. Negara dalam arti materiil adalah negara sebagai masyarakat, negara sebagai persekutuan hidup.

Beberapa ahli telah memberikan pendapatnya tentang pengertian negara ini, antara lain:

1. Harold J. Laski menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.⁷
2. Logemann mengartikan negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.⁸
3. Max Weber menyatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.⁹
4. Miriam Budiardjo menyatakan bahwa negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 39

⁸ M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 1

⁹ Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu*, 40

negara, hubungan antar lembaga-lembaga negara serta pelaksanaan berbagai fungsi dan kewenangan lembaga negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Suatu negara hanya akan hidup dan bergerak dinamis jika dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sebagai pemegang kekuasaan negara. Sedangkan kekuasaan negara itu dijalankan oleh lembaga-lembaga negara pada tingkat pusat maupun oleh lembaga negara pada tingkat lokal/daerah. Kekuasaan negara dibagi kepada lembaga-lembaga negara yang menurut Miriam Budiardjo dapat dibagi dalam dua cara, yaitu; ¹⁵ pertama; secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya dan dalam hal ini yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini nampak jelas dapat kita saksikan kalau kita bandingkan antara negara kesatuan, negara federal dan negara konfederasi. Kedua, secara horisontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Pembagian ini menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal dengan *trias politica*.

Secara umum suatu sistem kenegaraan membagi kekuasaan pemerintah kedalam "*trichotomy*" yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang biasanya disebut juga dengan teori *trias politica* yang dikemukakan oleh John

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan kedua puluh tujuh, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 138

Locke.¹⁶ Dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah tersebut terdapat adanya batasan-batasan dalam pelaksanaannya. Pembatasan tersebut berhubungan dengan pembagian kekuasaan pemerintahan. Kemudian Montesque menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga badan atau lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Masing-masing badan ini berdiri sendiri (independen) tanpa dipengaruhi oleh badan yang lainnya. Ketiga badan tersebut adalah badan Legislatif sebagai badan yang memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, badan Eksekutif sebagai badan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan badan Yudikatif sebagai badan yang memegang kekuasaan dalam bidang peradilan.

Seperti telah dijelaskan pada uraian di atas bahwa kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh tiga badan atau lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, salah satu dari ketiga lembaga tersebut adalah lembaga legislatif yaitu DPR. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR DPR Dan DPRD pada Bab III Pasal 24 disebutkan bahwa: "*DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara*".¹⁷ Selain mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara DPR juga mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Seperti lembaga-lembaga lain, DPR juga mempunyai berbagai

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), 121

¹⁷ UU NO.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR DPRD

- (1) DPR mempunyai tugas dan wewenang¹⁸:
 - a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
 - c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
 - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
 - h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
 - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

[illegible]

- l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
- m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
- n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
- o. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
- p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Disamping itu, untuk menunjang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya DPR mempunyai hak yaitu interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, hak angket kali pertama digunakan DPR pada 1950-an. Hal tersebut berawal dari usul resolusi RM Margono Djojohadikusumo agar DPR mengadakan angket atas usaha memperoleh dan cara mempergunakan devisa. Panitia angket yang kemudian dibentuk beranggotakan 13 orang yang diketuai Margono. Tugasnya adalah menyelidiki untung-rugi mempertahankan *deviden-regime* berdasar Undang-Undang Pengawasan Deviden 1940 dan perubahan-perubahannya.

Pasca reformasi, hak angket pernah digunakan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Hak angket digunakan terkait dengan upaya penyelidikan penyelewengan dana bulog serta bantuan dana dari sultan Brunei atau yang lebih

Adapun prosedur dan teknik penggunaan hak angket oleh DPR telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Bab III Pasal 30 diantaranya²¹:

- Lambaga legislatif dalam pandangan fiqh siyasah dapatlah dipersamakan dengan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *ahl*

²⁰ Oce Madril, *Angket DPR dan Pemakzulan Presiden* (Artikel JAWA POS, 10 Juli 2008), diakses 12 Mei 2011

²¹ UU NO.22 tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR DPRD

Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai kedudukan dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi jalannya pemerintahan;
2. Mengangkat dan memecat kepala negara;
3. Membuat undang-undang bersama kepala negara;
4. Datang setiap sidang;
5. Menetapkan rancangan anggaran dan pendapatan negara (RAPBN) dengan memperhatikan kepentingan rakyat;
6. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan negara;
7. Merumuskan dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan dilaksanakan oleh kepala negara.

Sesuai dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan hak angket DPR dengan mengadakan sebuah penelitian yang berjudul: “Pelaksanaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR Jo UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD dalam Perspektif Fiqh Siyash”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian antara lain:

1. Mekanisme pelaksanaan hak angket DPR
2. Hubungan pemerintah dan DPR dalam pelaksanaan hak angket

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan Hak Angket DPR menurut UU No. 6 tahun 1954 Jo UU No. 22 tahun 2003.
2. Untuk mengetahui pandangan Fiqih Siyasah terkait dengan penggunaan Hak Angket DPR menurut UU Nomor 6 Tahun 1954 Jo UU Nomor 22 Tahun 2003.

Dari hasil penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek, yaitu:

1. Aspek keilmuan (*teoritis*)

Yakni untuk menambah dan memperluas serta memperkaya khazanah intelektual pengetahuan tentang lembaga Legislatif, terutama tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penggunaan Hak Angket di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek terapan (*praktis*)

Yakni dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam upaya melihat dan menganalisa praktek politik lembaga Kenegaraan terutama lembaga Legislatif dalam kewenangannya menggunakan Hak Angket yang telah diterapkan di Indonesia saat ini. Bagaimana kondisi riil politik ketatanegaraan yang ada saat ini.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi salah penafsiran (*miss interpretative*) dalam memahami arti dan maksud dari judul skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Hak Angket DPR menurut : Hak DPR untuk melakukan penyelidikan
UU No. 22 Tahun 2003 terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan
strategis serta berdampak luas pada kehidupan

bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁴ Dengan kata lain hak angket merupakan salah satu hak kontrol DPR terhadap kebijakan eksekutif.

Fiqh Siyasah : Hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir kepentingan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh naṣ-naṣ tafṣili yang juz'i dalam Alqur'an dan Sunnah.²⁵

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan analisis yakni penulis berusaha menggambarkan dan menganalisa tentang adanya dasar yuridis dari pelaksanaan Hak Angket DPR tersebut dimana data yang penulis gunakan berasal dari UU Nomor 6 Tahun 1954 dan juga UU Nomor 22 Tahun 2003 dimana kedua Undang-Undang tersebut didalamnya

²⁴ Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang No. 22 tahun 2003

²⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 23

LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pada masa pemerintahan Islam, khususnya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW yaitu sejak masa Khalifah Umar ibn al-Khattab dikenal *asy-Asyura* atau *Ahl Halli Wal 'Aqdi*, yaitu musyawarah beberapa sahabat senior untuk menentukan kebijakan negara dan untuk mengangkat khalifah, walaupun dalam bentuk yang belum terlembagakan secara tersendiri.¹ Sebelum masa Islam, di kota Makkah telah dikenal apa yang disebut *Darun Nadwah*, yaitu perwakilan tokoh-tokoh masyarakat di kota Makkah untuk merumuskan masalah negara dan kemasyarakatan.²

Kata *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* tidak pernah disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits. Penggunaan istilah *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* mulai muncul dalam kitab kitab para ahli tafsir dan para ahli fiqh setelah masa Rasullullah saw. Yaitu pada masa shahabat.³ Dasar penyebutan bagi mereka adalah tercakup dalam kata *Uliil Amri* yang disebutkan dalam surat *An-Nisa'* ayat 59 yang berbunyi:

³ Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), 78.

memilih sang imam, kepala negara. Jika khalifah memutuskan memilih dan menentukan mereka, maka seketika itu ia berarti bertindak sesuka hati di dalam memilih orang yang akan menggantikannya secara tidak langsung.

C. Wewenang *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

Ahl al-ḥall wa al-‘aqd mempunyai kedudukan dan wewenang sebagai berikut:

1. Mengawasi jalannya pemerintahan;
2. Mengangkat dan memecat kepala negara;
3. Membuat undang-undang bersama kepala negara;
4. Datang setiap sidang;
5. Menetapkan rancangan anggaran dan pendapatan negara (RAPBN) dengan memperhatikan kepentingan rakyat;
6. Merumuskan gagasan yang dapat mempercepat tercapainya tujuan negara;
7. Merumuskan dan menetapkan Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan dilaksanakan oleh kepala negara.¹⁶

Taqi al-Din al-Nabhani menyebutkan bahwa setiap perkara yang masuk kepada wilayah “otoritas musyawarah” adalah wewenang anggota majelis untuk diambil keputusannya (misalnya, masalah program negara pendidikan kesehatan ekonomi dan yang lain lainnya). Keputusan yang diambil anggota majelis

¹⁶ Aqil bil Qisthi, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 22

D. Landasan Fiqh Siyasaah Tentang Pengawasan Terhadap Pemerintah

Dasar *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dalam kitab *Allah*, yakni *Ulil Amri* legislatif dan pengawas atas kewenangan eksekutif, terutama pimpinan tertinggi negara, ia hanya disebutkan dengan lafal *al-Ummah*, dan tugasnya hanya terbatas pada dua hal. Pertama mengajak kepada kebaikan, termasuk didalamnya segala perkara umum yang diantaranya menetapkan hukum atau peraturan untuk rakyat yang dibuat lewat musyawarah. Kedua, menindak penguasa yang zalim, yakni yang melakukan penyimpangan dalam pemerintahan.²⁴

²³ Rasyid Ridha, *al-Khilafah...*, 28.

[illegible]

“Dan orang mukmin yang bertakwa harus menentang orang yang melakukan kejahatan dari kalangan mereka atau menuntut orang yang melakukan ketidakadilan atau perbuatan dosa atau permusuhan, atau kerusakan diantara orang-orang mukmin. Mereka semua harus menentang secara bersamaan walaupun terdapat anak salah seorang mereka.(pasal13)”

*“Dan sesungguhnya orang mukmin yang bertakwa harus berpegang
petunjuk yang terbaik dan paling lurus (pasal20)”²⁸*

Pasal tersebut mengandung makna ketakwaan seseorang mukmin terdiri dari dua dimensi yang saling berkaitan vertikal dan horisontal. Vertikal memuat makna ibadah kepada Tuhan, dan horizontal melakukan *amr ma'ruf nahi munkar* dan tentunya melakukan kebaikan dan mencegah kejahatan terhadap manusia.

Hak untuk mengawasi kepala negara dan pengawasan kepada penguasa sangat di pelihara pada awal Islam (masa *ṣaḥābat*) kebanyakan kepala negara meminta umat untuk mengawasi dan mengevaluasi mereka, jika melihat penyimpangan dalam tingkahlaku mereka, diantaranya adalah

²⁸ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Alqur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 1994), 260.

membentuk dewan ulama' dijadikan rujukan oleh mereka. Dikatakan bahwa Umar membentuk dewan ulama' yang di pimpin oleh Abdullah bin Mas'ud. Para anggota majelis syura yang oleh para pemikir politik Islam disebut *ahlul halli wa al-'aqd* wajib melakukan musyawarah, melakukan pengawasan, dan mengawal moral khalifah.³²

Seluruh ahli hukum dan pemikir politik muslim bersepakat bahwa siapa saja yang diberi amanat mengatur urusan-urusan masyarakat “istilah teknis nya adalah khilafah” wajib melakukan tugasnya melalui musyawarah dengan anggota majelis syura selain itu khalifah wajib mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada majelis syura.³³

Musyawarah dalam penggunaannya berlandaskan pada firman *Allah* dalam alqur'an terdapat dalam Surat Al-Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
(١٥٩)

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka

³² Suntana, *Model Kekuasaan Legeslatif*, 4

³³ *Ibid.* 4-5.

**PENGUNAAN HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 1954 TENTANG
PENETAPAN HAK ANGKET DPR Jo UU NOMOR 22 TAHUN 2003
TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MPR, DPR, DPRD**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Sebelum Amandemen UUD 1945

Pada periode pertama, berlakunya UUD 1945 sangat singkat dengan menggunakan sistem pemerintahan berdasar undang-undang dasar tersebut. Namun tidak bisa berjalan baik karena masa revolusi dan perang kemerdekaan. Kabinet pertama yang terbentuk berdasar undang-undang dasar 1945 adalah kabinet kuasa Presidensiil yang dibentuk pada tanggal 2

[illegible]

September 1945.² Baru dua bulan kabinet terbentuk, keluarlah Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945, yaitu penyerahan kekuasaan legislatif dari MPR dan DPR kepada Komite Nasional Pusat (KNIP) sebelum MPR dan DPR terbentuk, dan pembentukan Badan Pekerja KNIP. Atas usul Badan Pekerja KNIP tanggal 11 November 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang berisi perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem Parlementer.

Pada saat berlakunya Konstitusi RIS, dimana negara Indonesia berubah menjadi Negara Serikat, menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Demikian juga pada masa berlakunya UUDS 1950 juga menerapkan sistem pemerintahan parlementer, yaitu kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Setelah kembali pada UUD 1945 dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlakulah kembali UUD 1945, yang dalam perkembangan praktek pemerintahan selanjutnya terjadi berbagai penyimpangan dari ketentuan undang-undang dasar antara lain dengan sistem demokrasi terpimpin pada masa Orde Lama dan menjadikan Presiden Soekarno sangat berkuasa dan menjadi Presiden seumur hidup. Pada masa Orde Baru Presiden Soeharto merubahnya menjadi demokrasi Pancasila namun pada akhirnya juga tidak berjalan dengan baik.

² Ibid., 93

responsibility upon the presiden). Presiden adalah mandataris MPR, dia tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden senantiasa dapat diawasi oleh DPR, dan Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Karena itu Presiden harus dapat bekerja bersama-sama dengan DPR, akan tetapi Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.⁵

9

9

9

9

sebaliknya, kekuasaan membentuk undang-undang berada pada legislatif, sedangkan presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR.⁶

dapat atau berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada presiden, namun kekuasaan utama tetap kepada presiden. Karena itu dalam amandemen pertama dan kedua UUD1945, ketentuan demikian dibalik, yakni: dalam pasal lima ayat (1) (yang baru) dinyatakan bahwa presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR, selanjutnya dalam pasal 20 ayat(1) ditegaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tetapi berdasarkan amandemen pertama dan kedua UUD 1945, kekuasaan membentuk undang-undang tersebut dialihkan dari presiden ke DPR, dengan demikian dalam proses perubahan UUD1945 itu telah terjadi peralihan kekuasaan legislatif yang sesungguhnya dari presiden ke DPR.¹⁴

Pergeseran dari kekuasaan legislatif di atas ialah, bahwa presiden dan badan-badan pemerintah berubah menjadi pelaksana aturan (eksekutif) belaka. Kewenangan untuk mengatur (*regaling*), jika ada haruslah dilandasi oleh atribusi dan atau delegasi yang bersumber dari kewenangan parlemen untuk mengatur atau membuat aturan. Dengan demikian produk hukum yang ditetapkan oleh presiden atau pemerintah tidak saja harus sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR dan juga UUD.¹⁵

¹⁴ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif* (dibidang peraturan pengganti undang-undang PERPU), (Malang, UMM Pres, 2002), 46-47

¹⁵ Ibid, 47

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

Sedangkan dalam pelaksanaan hak angket mengacu pada UU no 6 tahun 1954. dalam undang-undang tersebut di atur tata cara pelaksanaan hak angket yang dilakukan oleh DPR. Dalam UU tersebut terdiri dari 30 pasal disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Februari tahun 1954 dan disahkan langsung oleh presiden Republik Indonesia saat itu yaitu presiden Soekarno, dan diundangkan pada tanggal 16 Februari 1954 oleh menteri kehakiman pada saat itu Djody Gondokusumo. Pada pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 berisi tentang kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadakan angket dengan mekanisme: 1) Usul untuk mengadakan angket diajukan dengan tertulis oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat; 2) Putusan untuk mengadakan angket diambil dalam suatu rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat, yang diadakan sesudah usul itu dibicarakan dalam seksi atau seksi-seksi yang bersangkutan, dan putusan itu memuat perumusan yang teliti tentang hal yang akan diselidiki.; 3) Putusan selengkapnya, diumumkan dengan resmi dalam Berita Negara, sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.; 4) Nama-nama anggota yang diangkat dalam suatu Panitia Angket dan jumlah anggota sekurang-kurangnya, yang berhak melakukan pemeriksaan-

pemeriksaan juga diumumkan sesuai dengan risalah Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Dan 5) Pengluasan tambahan atau penggantian anggota-anggota Panitia Angket begitu juga pembubarannya diumumkan dengan cara seperti tersebut dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.

Selanjutnya pada pasal 3 sampai dengan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 berisi tentang mekanisme dan teknis pelaksanaan hak angket oleh panitia angket, pemanggilan saksi, keterangan saksi ahli, dan laporan hasil panitia angket.

Masa jabatan dari Panitia angket DPR tidak tergantung pada masa jabatan DPR yang membentuknya, jika masa jabatan DPR yang membentuknya habis, kerja panitia angket tetap diteruskan sampai DPR baru menentukan lain. Hal ini tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 yang berbunyi: "Kekuasaan dan pekerjaan Panitia Angket tidak tertunda oleh penutupan sidang-sidang atau pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuknya sampai Dewan Perwakilan Rakyat baru menentukan lain."

Selanjutnya, mengenai anggaran belanja panitia angket ditentukan dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat untuk menentukan anggaran satu tahun. Peraturan ini terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 berbunyi: "Rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat menentukan

**PENERAPAN MEKANISME HAK ANGKET
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UU NOMOR 6
TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN HAK ANGKET DPR
JO UU NOMOR 22 TAHUN 2003 TENTANG SUSUNAN DAN
KEDUDUKAN MPR, DPR DAN DPRD DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Sebelum dilaksanakan amandemen UUD 1945, salah satu prinsip negara adalah kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Majelis ini menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara, mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Presiden. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia adalah mandataris dari Majelis. Presiden “*untergeordnet*” kepada Majelis.

Dengan demikian sistem perwakilan rakyat dalam periode UUD 1945 sebelum perubahan, khususnya MPR memiliki kewenangan yang sangat besar, yaitu sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat dan dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem perwakilan itu sendiri terbagi dalam dua lembaga yaitu, *pertama*; MPR memiliki kewenangan sangat besar yang anggotanya terdiri anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan, dan *kedua*; DPR, yang memiliki kewenangan hanya dalam bidang membahas dan menyetujui rancangan undang-undang, rancangan Anggaran Belanja Negara dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah.

DPR juga mempunyai fungsi pengawasan yaitu fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD RI 1945, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut, DPR mempunyai 3 hak yaitu: *Hak interpelasi* yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Hak angket* yaitu

Yusuf Qaradhawi menyebutkan bahwa kewenangan majelis *syura* ada dua, yakni yang pertama melakukan pengawasan (*muḥāsabah*); dan kedua membuat undang-undang (*tasyri'*). Qaradhawi memaknai *muḥāsabah* dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu memberikan pelurusan terhadap perilaku yang menyimpang orang yang diberi kepercayaan oleh mereka. Adapun yang dimaksud *tasyri'* oleh Qardhawi adalah melakukan penalaran terhadap berbagai masalah untuk diidentifikasi secara syari'at. Istilah yang dekat dengan *tasyri'* ini adalah *ijtihad, istinbat, tafsil, atau takyif*.

Hak untuk mengawasi kepala negara dan pengawasan kepada penguasa sangat dipelihara pada awal Islam (masa *ṣahabat*) kebanyakan kepala negara meminta umat untuk mengawasi dan mengevaluasi mereka, jika melihat penyimpangan dalam tingkah laku mereka, diantaranya adalah pidato Abu Bakar sesaat setelah penobatannya sebagai khalifah: “wahai manusia sekalian aku diangkat menjadi pemimpin kalian namun aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika kalian melihat aku berada diatas kebenaran maka bantulah aku. Namun jika kamu melihat aku berada di atas kebatilan maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat, ketahuilah yang terkuat diantara kalian, kuat di sisiku hingga aku memberikan haknya

Dengan melihat ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tersebut menggunakan prinsip musyawarah.

Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengangkat empat belas orang perwakilan dari kalangan Anshar dan Muhajirin yang dijadikan rujukan melalui musyawarah dalam beberapa kasus sosial, politik, ekonomi. Selain kegiatan Nabi SAW. Hal senada juga pernah dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab ketika membentuk dewan ulama' dijadikan rujukan oleh mereka. Dikatakan bahwa Umar membentuk dewan ulama' yang di pimpin oleh Abdullah bin Mas'ud.

Dengan demikian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaan hak angket DPR menurut Undang-Undang No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, dan juga termuat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak bertentangan dengan landasan dalam mengawasi pemerintah yaitu dengan musyawarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak angket DPR yang termuat dalam UU No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga termuat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan teguran kepada pemerintah yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi wakilnya. Hal ini sesuai dengan an-Nahl: 125 dan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan untuk memberikan teguran jika melihat suatu kemunkaran. Dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk *amr ma'ruf nahi munkar*.
2. Dalam mekanisme pelaksanaan hak angket DPR yang termuat dalam UU No. 6 tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga termuat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD merupakan cara yang dilakukan DPR dalam memberikan teguran kepada pemerintah dengan menyelidiki pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya

1. Bagi pemerintah, diharapkan untuk memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan oleh DPR dalam mensukseskan agenda pelaksanaan Hak Angket. Karena itu merupakan pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat melalui wakilnya yang duduk di DPR
2. Bagi DPR, diharapkan dalam menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dikawal hingga proses hukum selesai, jika tidak maka itu merupakan penghianatan terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat.
3. Untuk kalangan akademisi, skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis berharap ini dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya, sebagai mediasi pihak akademisi dan masyarakat umum untuk mengkaji secara kritis tentang hak angket DPR.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jus xxv terj.* Anshari Umar dkk. Semarang: Pt Karya Toha Putra Semarang, 1992
- Abdul Mu'in Salim, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002
- Abi Ya'la Muhammad bin al Husain al Hanbali al-Farra', *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2007
- Aqil bil Qisthi, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1985
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Putra Bardin, 1999
- Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005
- Fuad Said, H.A., *Ketatanegaraan Menurut Islam*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang, 2005
- Ija Suntana, *Model Kekuasaan Legeslatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Ringkasan dan Terj. Abu Fajar al-Qalamy, Semarang: CV. asy-Syifa', 2003
- Inu Kencana Syafi'ie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama, 2001
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintah Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Alqur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 1994
- M. Solly Lubis, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1990

